

KONFLIK POLITIK DALAM PERGERAKAN SAREKAT ISLAM 1926

POLITICAL CONFLICT IN THE SAREKAT ISLAM MOVEMENT OF 1926

Retno Winarni dan Mrr. Ratna Endang Widuatie
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember
Pos-el: retnowinarni122@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini mendiskusikan konflik politik dalam pergerakan Sarekat Islam 1926. Fokus kajian adalah bagaimana terjadinya konflik politik dalam pergerakan Sarekat Islam, faktor yang melatarbelakangi, dan dampaknya. Hasil kajian menunjukkan bahwa konflik disebabkan perbedaan ideologi perjuangan antara kelompok Semaun dengan kelompok Cokroaminoto. Kelompok Semaun membawa ideologi komunis yang kemudian dikenal dengan sebutan SI Merah dan mengambil jalan *noncooperative*, sedangkan kelompok Cokroaminoto dengan nama SI Putih dan memilih strategi *cooperatif* dengan pemerintah Hindia Belanda. Konflik ini menimbulkan perpecahan dalam tubuh organisasi Sarekat Islam dan akhirnya kelompok SI Merah memisahkan diri dan bergabung dengan Partai Komunis Hindia. Sementara itu, tokoh-tokoh SI Putih, antara lain Cokroaminoto mengumumkan kebijakan partai dengan melarang seseorang memasuki organisasi politik lebih dari satu.

Kata kunci: konflik, politik, Sarekat Islam Merah, Sarekat Islam Putih

Abstract

This article discusses the political conflict in the movement of 1926. The focus of research is how did the political conflict in the movement of the SI occur, what factors were behind the conflict, and what impact did it bring. This study revealed that the conflict was caused by ideological differences between Semaun group and Tjokroaminoto group. The Semaun group promoted a communist ideology which was later known as the Red Sarekat Islam and took a non-cooperative path, while the Tjokroaminoto group or White SI chose a cooperative strategy with the Dutch government. These conflicts caused a split in the organization of the SI and Red SI group finally separated and joined the Netherland Indies Communist Party. Meanwhile, the figures of White SI, among others Tjokroaminoto, announced the party's policy to prohibit a person entering more than one political organization.

Keywords: political conflict, red Sarekat Islam, white Sarekat Islam

A. Pendahuluan

Pergolakan sosial politik dengan segala bentuknya, bukanlah suatu hal baru dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Gejala ini semakin meningkat setelah permulaan abad ke XX meskipun dalam bentuk pergerakan yang berbeda dengan abad-abad sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya penetrasi kolonial secara intensif memasuki kehidupan sehari-hari rakyat melalui pajak yang berat, pengerahan tenaga buruh yang berlebih-lebihan dan peraturan-peraturan yang menindas, maka dirasakan bahwa realitas kekuasaan kolonial tidaklah cocok dengan realitas sosial dan stabilitas yang dicita-citakan oleh rakyat. Proses perubahan ekonomi yang cepat pada pemerintahan kolonial Belanda yang diiringi proses reorganisasi serta disorientasi dan selanjutnya timbullah keresahan. Hal ini membawa alam pikiran simbolis rakyat mengalami krisis. Proses inilah yang merupakan faktor pendorong terjadinya pergolakan sosial dalam masyarakat dengan segala manifestasi dan tindakannya (Schrieke, 1955:190). Perjuangan pergerakan bersifat religius yang dilakukan oleh masyarakat Islam, ini merupakan suatu ciri yang khas dari suatu pergerakan masyarakat Islam modern yaitu dengan membentuk organisasi-organisasi seperti Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah.

Soekiman Wiryosandjojo, salah seorang tokoh Sarekat Islam muda mengatakan bahwa, pada dasarnya Sarekat Islam adalah suatu organisasi pergerakan berdasarkan ajaran Islam, tetapi lebih mengutamakan kebangsaan. Konsekuensinya Sarekat Islam sangat mementingkan persatuan untuk mewujudkan suatu *natie* (bangsa), karena itulah, maka kegiatan orang-orang *Indiche Socialistisch Democratische Vereniging* (ISDV) yang mempropagandakan sosialisme dan prinsip perjuangan ke dalam tubuh Sarekat Islam, sebagaimana dilakukan terhadap perkumpulan Insulinde yang kemudian menjadi *National Indische Partij*, Budi Utomo, dinilai oleh

pimpinan Sarekat Islam sebagai infiltrasi dari luar, atau subversi yang membawa kepentingan Belanda, entah dari partai komunis atau mungkin malahan dari pemerintah Belanda sendiri yang tidak menghendaki terbentuknya persatuan berdasarkan kebangsaan, seperti yang dikehendaki dan diusahakan oleh Sarekat Islam (Noer, 1982:137). Sarekat Islam ketika baru berdiri adalah suatu gerakan sosial ekonomi yang didukung kelompok pedagang dan pengusaha pribumi yang bergabung dalam organisasi Sarekat Dagang Islam, didirikan di Solo pada tahun 1911 oleh Haji Samanhudi, seorang pengusaha dan pedagang batik yang berhasil mendirikan cabang-cabang perusahaannya di Surabaya, Banyuwangi, Tulungagung, Bandung dan Tarakan bersama dengan partner dagangnya, seperti Mas Asmadiredjo, Mas Kertotaruno, Mas Soemowerdojo dan Mas Haji Abdul Radjak. Mereka meminta bantuan terutama dalam merumuskan anggaran dasarnya dari seorang terpelajar lulusan OSVIA bernama Tirtoadisurjo, yang telah meninggalkan dinas pemerintahan dan menjadi wartawan serta menerbitkan majalah Medan Prijaji, pada tahun 1909 mendirikan perkumpulan dagang bernama Sarekat Dagang Islam di Batavia dan pada tahun 1911, mendirikan juga Sarekat Dagang Islam di Bogor. Kedua organisasi tersebut dimaksudkan untuk membantu pedagang-pedagang bangsa Indonesia dalam menghadapi saingan orang-orang Cina. Pada tahun 1911 dia mendorong seorang pedagang batik yang berasal dari Surakarta bernama Haji Samanhudi (1868–1956) untuk mendirikan Sarekat Dagang Islam sebagai suatu koperasi pedagang batik anti Cina. Cabang-cabang lainnya segera didirikan. Di Surabaya H.O.S Tjokroaminoto (1882–1934) menjadi pimpinan organisasi tersebut. Dia juga seorang lulusan OSVIA yang telah mengundurkan diri dari dinas pemerintahan. Dia merupakan tokoh yang mempunyai kharisma karena sikapnya yang memusuhi orang-orang yang memegang kekuasaan, (baik yang berkebangsaan Belanda

maupun Indonesia), dan dengan cepat menjadi pemimpin terkemuka dari gerakan rakyat yang pertama (Ricklef, 2005:252).

Pada tahun 1912 Sarekat Dagang Islam berubah namanya menjadi Sarekat Islam (SI). Percekcokan terjadi antara Tirtoadisurjo dan Samanhudi, sehingga Samanhudi yang sebagian besar waktunya tersita untuk urusan-urusan dagang, meminta bantuan Cokroaminoto untuk memimpin organisasi. Asal usul organisasi yang bersifat Islam dan dagang segera menjadi kabur, dan istilah Islam pada namanya kini sedikit banyak lebih mencerminkan adanya kesadaran umum bahwa anggota-anggotanya yang berkebangsaan Indonesia adalah kaum muslimin, sedangkan orang-orang Cina dan Belanda adalah bukan muslim. Cokroaminoto sendiri tampaknya tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Islam (Ricklef, 2005:252).

Sarekat Islam dengan dasar keagamaannya mempunyai potensi luar biasa untuk meng-himpun pengikut di antara rakyat kebanyakan. Tujuannya memang sosial ekonomi, menertibkan kehidupan keagamaan, mempertinggi taraf kehidupan rakyat pada umumnya, dan menganjurkan kepatuhan kepada pemerintah. Pemerintah Hindia Belanda menyadari kekuatan organisasi massa tersebut, sehingga berkeberatan untuk menyetujui pendirian Sarekat Islam selaku organisasi nasional (Kartodirdjo, dkk, 1976:64). Sejak tahun 1912 SI berkembang pesat dan untuk yang pertama kalinya tampak adanya dasar rakyat walaupun sukar dikendalikan dan hanya berlangsung sebentar. Pada tahun 1919 SI menyatakan mempunyai anggota 2 juta orang, tetapi jumlah yang sesungguhnya mungkin tidak pernah lebih dari setengah juta orang (Ricklef, 2005:252). Gubernur Jenderal Idenburg secara hati-hati mendukung SI, dan pada tahun 1913 dia memberi pengakuan resmi kepada SI, tetapi hanya mengakui organisasi-organisasi tersebut sebagai suatu perkumpulan cabang-cabang yang otonom saja daripada sebagai suatu organisasi nasional yang dikendalikan

oleh markas besarnya Central Sarekat Islam (CSI) (Ricklef, 2005:253).

Organisasi ini realitanya merupakan perkumpulan kaum pengusaha dan pedagang pribumi, berdasarkan koperasi, dengan tujuan abstraknya berikhtiar mengangkat derajat rakyat agar menimbulkan kemakmuran, kesejahteraan dan kebesaran negerinya. Bagi Raden Mas Tirtohadisurjo, perumus anggaran dasar itu, pendirian Sarekat Dagang Islam merupakan sambutan kaum muslimin untuk mencapai kemajuan sesuai dengan semangat zaman. Sementara itu Islam adalah simbol identitas kepribumian, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Tujuan Sarekat Dagang Islam yang hakiki memang bukan berorientasi pada ideologi politik atau paham keagamaan, bahkan bukan Islam sekalipun yang terutama hendak dicapai adalah menambah jalan baru untuk perdagangan anak negeri. Artikel ini ditulis bertujuan menjawab pertanyaan "mengapa terjadi konflik dalam pergerakan Sarekat Islam", yang akan dikongkritkan pada pertanyaan sebagai berikut: (1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan konflik, (2) Bagaimana proses terjadinya konflik tersebut (3) bagaimana akhir dari konflik tersebut (dampak).

B. Sarekat Islam dan Pergerakan Kebangsaan

Sebenarnya sebelum mendirikan Sarekat Islam, Haji Samanhudi bersama-sama dengan saudara-saudara, teman dan pengikut-pengikutnya yang terdiri atas pengusaha di kampung batik Lawean dan pegawai rendah Kasunanan Surakarta, telah membentuk perkumpulan lokal bersama "Rekso Rumecko" (saling menjaga), suatu perkumpulan ronda untuk menjaga keamanan kampung. Mereka bukanlah golongan terpelajar, sehingga tidak mengetahui seluk-beluk pemerintah yang mengharuskan suatu organisasi memerlukan badan hukum, karena itu maka Raden Ngabei Djojomargoso seorang pegawai kepatihan yang dekat dengan Samanhudi, mengambil inisiatif untuk meminta

bantuan Raden Martodharsono, bekas redaktur Medan priyayi dan temannya Tirtoadisoerjo, untuk mengorganisasikan suatu koperasi dagang dan sekaligus bisa memecahkan masalah badan hukum. Untuk menghindari masalah dalam berhadapan dengan polisi, Martodharsono mengatakan bahwa Rekso Rumecko adalah cabang Sarekat Dagang Islam Bogor yang dibentuk oleh Tirtoadisoerjo. Kemudian ia pun menghubungi Tirtoadisoerjo yang kemudian datang sendiri ke Solo pada tahun 1912 untuk membuat anggaran dasar bagi organisasi yang diberi nama Sarekat Islam.

Sebagai perkumpulan ronda, awalnya Rekso Rumecko bertujuan menjaga keamanan dari penjahat yang banyak melakukan pencurian di Lawean dan kota Solo, tetapi sebenarnya Rekso Rumecko dibentuk untuk menandingi perkumpulan Kong Sing. Kong Sing adalah perkumpulan yang didirikan tahun 1911 beranggotakan orang Cina maupun Jawa, tetapi didominasi oleh golongan orang-orang Jawa. Pada awal abad XX, karena pengaruh gerakan nasionalisme untuk mendirikan Republik Tiongkok dan menggulingkan Kerajaan Manchu, di Indonesia telah timbul pula rasa kebangsaan dikalangan penduduk Cina, yang menimbulkan kegiatan-kegiatan, sebagian untuk membantu gerakan Hsung Chung Hui yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat Sen di negeri leluhur mereka, sebagian kegiatannya merupakan usaha melawan pemerintah Belanda yang menerapkan politik diskriminasi terhadap warga Cina sebaliknya Jepang diperlakukan sebagai bangsa Eropa. Pembatasan kemerdekaan bergerak terhadap warga Cina di Nusantara, sehingga menghambat usaha perdagangan mereka dan tidak memberi kesempatan kepada anak-anak Cina untuk memasuki sekolah Belanda. Sebagai reaksi, mereka mendirikan perkumpulan sendiri bernama Tiong Hwa Hwee Koan, pada tahun 1901. Usaha yang dijiwai Revolusi Tiongkok itu malahan mendahului berdirinya Budi Utomo, suatu organisasi kebudayaan yang bersifat kejawaan yang baru didirikan pada tahun 1908

dan kemudian diakui resmi sebagai tahun Kebangkitan Nasional (Poespoprodjo, 1984:44; Soyomukti, 2012:139).

Gerakan masyarakat Tionghoa dilatarbelakangi oleh kedudukan sosial ekonomi mereka yang telah kuat. Sejak abad XVII di Nusantara bentuk-bentuk organisasi perdagangan Internasional Belanda yang praktis memerintah Nusantara, melakukan kebijaksanaan untuk menyewakan desa-desa dalam jangka waktu yang panjang kepada pedagang-pedagang Tionghoa yang bertindak sebagai pengawas politis atau pengawasan resmi atas tanah dan tenaga buruh perkebunan tebu, dimana mereka bertindak sebagai pemborong dan kelompok feodal baru yang diberi kekuasaan untuk melakukan tindakan kekerasan kepada penduduk (Winarni, 2011:146–150). Selain itu pemerintah Belanda kemudian juga mempergunakan klas menengah Tionghoa sebagai perantara dalam perdagangan dan pemungutan pajak (Carey, 1984:65–79). Setelah sistem Tanam Paksa dihapus, pemerintah Belanda juga menjual tanah-tanah luas kepada pengusaha-pengusaha Eropa dan Tionghoa. Di bawah pemerintah Belanda, etnis Tionghoa yang pada tahun 1860 berjumlah sekitar 222.000, dan meningkat menjadi 563.000 pada tahun 1908 (Coppel, 1983:2), sedangkan dari jumlah tersebut, dua pertiganya tinggal di Jawa, telah tumbuh menjadi kelompok feodal baru, kapitalis pedagang (*merchant capital*) yang menguasai perdagangan eceran, bahkan juga perdagangan besar yang memiliki hubungan dengan produsen dan konsumen di pedesaan maupun di luar desa, ke daerah-daerah lain. Tidak adanya hubungan dengan dunia di luar desa, tidak memungkinkan berkembangnya pedagang-pedagang pribumi yang sanggup melawan pedagang Tionghoa. Kesempatan akumulasi kapital dagang itu membuka kesempatan pada golongan Tionghoa untuk mendirikan industri sehingga sejak abad XVIII, industri gula di Jawa, umpamanya terutama berada di tangan orang Tionghoa (Susanto, 1996:18).

Bidang perbatikan, pedagang Tionghoa menguasai jaringan niaga, bahan baku impor dan pemasaran produksinya (Wasino, 2006:26), sehingga mampu memperlmainkan harga dan pemogokan pasar, seperti yang terjadi di Surabaya pada bulan Pebruari 1912, dan menjadikan produsen kecil pribumi bergantung dan terpojok, tanpa kemampuan mengembangkan usaha mereka. Reaksi terhadap monopoli tersebut, maka Tirtoadisoerjo dan Martodharsono, seseorang yang di samping bekerja sebagai wartawan juga dikenal sebagai “guru kebal”, memperkenalkan cara baru untuk menghadapi pedagang Tionghoa dengan boikot. Pertama-tama hal itu dilakukan terhadap toko “Sie Dhian Ho” dan beberapa toko Tionghoa lainnya, yang diikuti dengan perkelahian-perkelahian, malah melibatkan 90 orang prajurit Mangkunegaran dalam penyerangan pasar Gede.

Sebagai perkumpulan yang menggabungkan ciri persekutuan Dagang Pribumi dan organisasi keamanan Rekso Rumekso Sarekat Islam, pada awal pertumbuhannya tidak memperlihatkan corak sebagai organisasi keagamaan. Ia bukan semacam Muhammadiyah, umpamanya yang paham keislamannya kentara, Sarekat Islam pada awal pertumbuhannya merupakan gerakan yang bermotifkan kepentingan sosial ekonomi dari golongan pengusaha dan pedagang kecil pribumi yang ingin mendapatkan kesempatan berkembang. Sementara itu, sejak tahun 1901 pemerintah Belanda, sebagai pelaksanaan politik etis, memang bermaksud untuk memajukan usaha pribumi, baik di bidang agraria maupun industri, antara lain dengan mendirikan bank kredit rakyat pada tahun 1904 yang sangat mendesak peranan pembunga uang yang dikenal dengan istilah “Cina Mindring” yang juga merupakan alasan kekecewaan orang-orang Tionghoa terhadap pemerintah Belanda. Sarekat Islam sebenarnya lebih berhadapan dengan golongan Tionghoa daripada dengan pemerintah Belanda. Malahan Gubernur Jendral Idenburg pernah memperlihatkan rasa simpatinya kepada

Sarekat Islam yang dinilainya menandakan bangkitnya kesadaran hukum pribumi, sebagai yang dikehendaki politik etis.

Pendirian Sarekat Dagang Islam di Betawi pada tahun 1909 telah diikuti kegiatan yang sama di banyak kota lainnya. Sarekat Dagang Islam di Surakarta didirikan pada tahun 1911 dan yang kemudian menjadi gerakan kebangsaan, khususnya setelah berganti nama menjadi Sarekat Islam pada tahun 1913. Sarekat Islam membawa sukses luar biasa dalam mendirikan toko-toko di banyak kota. Toko-toko Sarekat Islam adalah cerminan dari keberhasilan organisasi tersebut untuk menggalang permodalan dengan menjual saham kepada para anggotanya. SI juga merupakan sukses ekonomi karena keberhasilannya bersaing dengan perusahaan Cina, namun kemudian Sarekat Islam berkembang menjadi organisasi massa. Hanya di beberapa tempat saja pengurusnya terdiri atas para pedagang, seperti yang ada di Jatinegara, dimana ketujuh anggota pengurusnya semuanya pedagang. Sarekat Islam di tempat lain, biasanya mencakup semua kelompok pencari nafkah di masyarakat setempat, termasuk para priyayi dan petani. Di Madura dan Surakarta, bahkan serdadu pribumi memasuki organisasi Sarekat Islam. Apa yang menjadi daya tarik organisasi tersebut bagi wong cilik ialah rasa kebersamaan sosial yang ditekankan dalam Sarekat Islam, namun dalam perkembangan selanjutnya terdapat perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam yaitu menjadi Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah.

C. Pertumbuhan Sarekat Islam 1911–1926

Di samping penindasan yang ditimbulkan oleh penjajah Belanda, di Indonesia tumbuh pula problema baru yaitu bagaimana rakyat Indonesia menghadapi perkembangan ekonomi yang telah lama dikuasai oleh pedagang Cina terutama atas monopolinya dalam perdagangan batik di Surakarta. Pertumbuhan Sarekat Islam memang pertama kali didahului oleh suatu

usaha untuk membendung monopoli. Oleh karena itu, dapat diutarakan di sini bahwa sebab timbulnya organisasi ini adalah, (1) Perdagangan bangsa Cina adalah halangan buat perdagangan Indonesia (monopoli bahan batik), ditambah pula dengan tingkah laku yang sombong sesudah revolusi Tiongkok; (2) Kemajuan gerak langkah penyebaran agama Kristen dan juga ucapan yang menghina dalam parlemen Belanda tentang kepercayaan agama bangsa Indonesia; (3) Cara adat lama yang terus dipakai di daerah-daerah kerajaan Jawa dirasakan sebagai penghinaan (Pringgodigdo, 1980:4). Berdasarkan adanya alasan tersebut dapatlah dipahami bahwa secara struktural kehidupan sosial masyarakat harus mengalami perubahan, oleh karena itu sebelum Sarekat Islam berdiri, telah didahului berdirinya organisasi seperti Sarekat Dagang Islam, Budi Utomo, yang kesemuanya ini masih memiliki sifat dan ciri sendiri-sendiri yang dibentuk oleh lingkungannya, pengaruh dari pemimpin-pemimpinnya. Selain itu adanya tantangan yang dihadapi oleh berbagai pihak di dalam atau di luar lingkungan masyarakat Islam (Koch, 1951:24).

Sarekat Islam didirikan di Solo pada tanggal 11 Nopember 1912, tumbuh dari organisasi yang tumbuh lebih dahulu yaitu Sarekat Dagang Islam. Berdirinya organisasi ini didorong adanya kompetisi yang meningkat di sektor perdagangan batik. Selain itu adanya tekanan dari kalangan bangsawan mereka sendiri. Sarekat Dagang Islam dimaksudkan untuk dijadikan benteng bagi orang-orang Indonesia yang pada umumnya terdiri atas para pedagang batik di Solo terhadap orang-orang Cina dan para bangsawan tadi (Tirtoprodjo, 1977:26–27).

Permulaan berdirinya Sarekat Islam ditandai dengan suatu perhatian khusus mencari pemimpin-pemimpin organisasi daerah maupun mencari bentuk organisasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia pada saat itu. Anggaran dasar pertama menyebutkan bahwa Sarekat Islam akan berhiar supaya anggota-anggotanya satu dengan lainnya ber-

gerak seperti saudara, dan supaya timbul kerukunan dan tolong-menolong satu dengan lainnya antara kaum muslimin. Dengan segala upaya yang halal dan tidak menyalahi wet-wet negeri (Surakarta) dan wet-wet Gubernement, berusaha mengangkat derajat rakyat agar menjadi makmur, sejahtera dan negara menjadi besar (Noer, 1982:18).

Organisasi ini berkembang dengan pesat. Anggotanya berjumlah 360.000 orang, mulai melancarkan suatu gerakan politik menuntut pemerintahan sendiri. Kegiatan Sarekat Islam ini sulit untuk diawasi, karena Residen Surakarta segera membekukannya (Kahin, 1952:82). Pencabutan itu yang dijadikan alasan karena seringnya terjadi perkelahian antara pribumi dan Cina serta timbulnya pemogokan buruh kebun di perkebunan Krapyak milik Mangkunegaran, tetapi kemudian pembekuan itu dicabut kembali tanggal 26 Agustus 1912 dengan syarat agar anggarannya diubah, hingga hanya terbatas pada daerah Surakarta saja.

Dalam periode tersebut timbul perselisihan paham antara Tirtoadisurjo dengan Haji Samanhudi, Sarekat Islam memperoleh seorang tokoh, Umar Said Cokroaminoto, yang diharapkan dapat mengemudikan organisasi tersebut dalam tahun-tahun awal yang sulit ini. Cokroaminoto masuk Sarekat Islam di Surabaya tahun 1912 atas ajakan Haji Samanhudi. Ia dipilih karena memiliki sikap yang radikal terhadap Belanda dan pemerintah pada umumnya, berpendidikan tinggi serta berpengalaman berorganisasi. Tanpa memperhatikan persyaratan Residen Surakarta, Cokroaminoto menyusun sebuah anggaran dasar baru untuk organisasi itu bagi seluruh Indonesia dan minta pengakuan pemerintah. Maksudnya untuk menghindarkan diri dari apa yang disebut "pengawasan preventif" (secara administratif), tetapi permintaan itu tidak mendapat persetujuan pada 30 Juni 1912, akan tetapi kemungkinan dalam permintaan dari organisasi daerah yang memiliki sifat yang sama akan dipertimbangkan sebaik-baiknya (Noer, 1982:18). Keputusan yang demikian itu

sangat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan organisasi Sarekat Islam yang di dalam kongresnya telah memutuskan berusaha mengembangkan organisasinya sampai ke pelosok tanah air. Di dalam mencari jalan keluar dari kegagalan usaha organisasi untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah, kemudian para pemimpin Sarekat Islam dari 50 daerah bersepakat dalam kongres di Surabaya 1915 untuk membentuk suatu pusat kegiatan organisasi atau dikenal dengan nama Central Sarekat Islam (Niel, 1970:125).

Central Sarekat Islam ini dipimpin oleh Haji Samanhudi sebagai ketua kehormatan, Cokroaminoto sebagai ketua, dan Dr. Gunawan sebagai wakil ketua, baru kemudian pengurus Central Sarekat Islam inilah yang diakui dan disetujui oleh pemerintah pada tanggal 18 Maret 1916 (Vey, 1961:56). Memang sebelum ini terbentuk keputusan Belanda mengganggu struktur organisasi dari Sarekat Islam. Karena itu pada kongresnya tahun 1913 di Surabaya ditekankan untuk membagi wilayah organisasi menjadi tiga bagian, yaitu Jawa Barat (meliputi Jawa Barat, Sumatra dan sekitarnya), Jawa Tengah (meliputi Kalimantan), Jawa Timur (meliputi Sulawesi, Bali, Lombok, Sumbawa dan pulau-pulau di daerah Indonesia Timur). Ketiga wilayah ini serta cabang-cabang Sarekat Islam berada di bawah pengawasan pengurus pusat di Surakarta yang diketuai oleh Haji Samanhudi.

Dalam masa pertumbuhannya Sarekat Islam memang masih sangat memerlukan dorongan dari para pemimpinnya, mengingat bahwa masa-masa yang demikian itu masyarakat dapat dikatakan masih buta organisasi. Mereka masuk menjadi anggota organisasi hanyalah terdorong dari emosinya, mengingat dari situasi dan kondisi pada masa penjajahan sangat menyusutkan jiwa serta perasaan masyarakat.

Para pengikut atau anggota organisasi di pedesaan secara tidak sadar mengikuti jejak panji-panji organisasi hanya terdorong oleh ketidakpuasan dan mengekspresikan kegelisahan yang diderita (Poespoprodjo, 1984:44).

Hal inilah yang menimbulkan keinginan untuk berontak kaum tani yang selama ini bertahan melawan perubahan zaman, jadi bukannya atas kesadaran untuk berjuang ke arah otonomi untuk perubahan sosial dan ekonomi pada umumnya. Pada situasi yang demikian ini tidaklah memungkinkan untuk organisasi yang bernafaskan Islam dapat mengembangkan kemurnian agama itu sendiri. Perkembangan dan pertumbuhan agama Islam pada awal pertumbuhan Sarekat Islam tidak akan dapat mengembangkan Islam secara kualitatif, akan tetapi Islam dapat berkembang secara pesat dalam masalah jumlah penganutnya saja. Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya gerakan pembaharuan Islam yang dimulai pada saat yang demikian itu nantinya akan menumbuhkan benih-benih kebangkitan kesadaran nasional dan perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari belenggu penjajah. Di samping itu pula pemikiran-pemikiran baru yang dilahirkan oleh tokoh-tokoh modernisasi Islam seperti Cokroaminoto, Agus Salim, tampak berhasil memberikan persepsi baru yang segar tentang Islam pada para pemeluknya. Munculnya organisasi Islam seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, memungkinkan meluasnya pemikiran-pemikiran baru itu ke seluruh kawasan Nusantara. Keberhasilan pemikiran modernisasi Islam berhasil pula memengaruhi berbagai organisasi Islam. Bukan saja telah membangkitkan kesadaran umat Islam terhadap agama mereka, tetapi juga membangkitkan perasaan nasionalisme. Dari sini jelas terlihat bahwa pembaharuan Islam di Indonesia berkaitan erat dengan pergerakan nasional Indonesia (Alfian, 1981:70).

Bersamaan dengan pertumbuhan Sarekat Islam, pada tanggal 25 Desember 1912 berdirilah suatu organisasi politik yang terkenal dengan nama Indische Partij, yang dalam langkah-langkahnya mengarah kepada gerakan menuju nasionalisme modern. Organisasi ini juga ingin

menggantikan Indische Bond yang anggotanya terdiri atas kaum Indo dan Eropa di Indonesia.

Pendirian Indische Partij disponsori oleh EFE Douwes Dekker, walaupun mereka seorang Indo tetapi memiliki suatu pemikiran bahwa untuk meningkatkan kehidupan pribumi Indonesia tidaklah mungkin apabila diiringi suatu perbedaan pandangan baik cara pergaulan berpolitik maupun cara hidup dari kaum Indo dengan kekuatan yang progresif dari pribumi Indonesia. Nasib para Indo tidak ditentukan oleh pemerintahan kolonial tetapi terletak di dalam bentuk kerja sama dengan penduduk Indonesia lainnya. Bahkan harus tidak mengenal supremasi Indo atas penduduk bumi putera, malahan ia menghendaki hilangnya golongan Indo dengan jalan peleburan ke dalam masyarakat bumi putera. Dengan demikian dapatlah dijalin suatu kekompakan dan persatuan bersama-sama mengatasi segala kesulitan yang ditumbuhkan oleh sistem penjajahan. Oleh karena itu, perkembangan organisasi ini sangat mudah diterima oleh segenap lingkungan masyarakat di seluruh Indonesia. Dalam waktu yang relatif singkat organisasi ini meluas di seluruh kawasan Indonesia umumnya dan Jawa pada khususnya. Tujuan Indische Partij adalah untuk membangunkan patriotisme semua "Indies" terhadap tanah air, yang telah memberi lapangan hidup kepada mereka agar mereka mendapat dorongan untuk bekerja sama atas dasar persamaan ketatanegaraan untuk memajukan tanah air "Hindia" dan untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka (Kartodirdjo, 1976:191).

Berdirinya organisasi ini bertujuan luhur, yaitu menjadikan manusia Indonesia berjiwa nasionalis yang luas untuk mencapai kemerdekaan. Akibat dari gerakan-gerakan politis yang seratus persen, setelah organisasi ini ingin mendapatkan pengakuan sebagai organisasi yang berbadan hukum dengan tegas ditolak pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, para pemimpin organisasi yang memiliki jiwa patriotis berpendapat bahwa, suatu kemerdekaan tidak mungkin dapat diperoleh

dengan jalan suatu kompromi dengan penjajah. Kemerdekaan juga tidak akan diperoleh dengan menunggu hadiah dari pemerintah kolonial. Kemerdekaan harus direbut, seperti ucapan Douwes Dekker bahwa "pengertian Hindia Belanda harus dipandang sebagai salah satu dari pada partai yang bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan". Pemerintah yang berkuasa di tanah jajahan, bukanlah pemerintah, melainkan penindasan, dan penindasan itu adalah musuh yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, lebih berbahaya daripada pemberontakan atau gerakan yang meminta perubahan pemerintahan (revolusi) (Koch, 1951:39).

Usaha organisasi Sarekat Islam untuk mencapai tujuan tidak berhenti sampai di situ, bahkan kemudian rasa tidak puas dari pemimpinnya dilampiaskan kepada pemerintah pusat Belanda yang mengakibatkan fatal bagi para pemimpin. Pemerintah Belanda mengadakan penangkapan pemimpin-pemimpin yang dianggap berbahaya dan menjerat hukuman buangan dan mereka memilih ke negeri Belanda. Dengan dibuangnya para pemimpin ini, mengakibatkan organisasi Indische Partij menjadi mundur dalam gerakannya. Sarekat Islam pada saat itu sangat kuat sehingga dapat menarik para anggota organisasi lain terutama orang-orang Indonesia, untuk menyalurkan tuntutannya mencapai suatu pergerakan ke arah nasionalisme Indonesia.

Politik etis dengan demikian sudah mulai goyah. Sarekat Islam pada mulanya tidak berpolitik. Dalam kongres 1913 Cokroaminoto mengatakan bahwa "kami bersikap loyal terhadap gubernement". Kami senang berada di bawah pemerintahan Belanda," namun di samping itu ditentukan pula bahwa organisasi ini terbuka bagi semua orang Indonesia, tidak terbatas pada golongan terpelajar saja (Margono, 1971:35).

Kongres yang diadakan 1916 dinamakan Kongres Nasional pertama, sehingga nampaklah usaha menggalang persatuan penduduk Hindia Belanda. Pada saat itu tampak pula bahwa Sarekat Islam telah mengambil sikap politik terhadap pemerintah. Tuntutan kongres pada

pemerintah adalah agar pemerintah mengakui pula wakil-wakil rakyat dan adanya otonomi yang lebih luas (Noer, 1982:132). Sebelum itu dalam tahun 1915 Sarekat Islam telah menjadi anggota Indie Weerbaar yang menuntut adanya parlemen milisi. Sarekat Islam kemudian terlihat dalam gerakan radikal yang bersumber pada Marxisme.

Paham komunisme atau marxisme ini diperkenalkan oleh HJFM Sneevliet, seorang anggota Sosial Demokratisk Arbeids Partij (berlandaskan marxisme) di Negara Belanda kepada kalangan pergerakan nasional. Kemudian paham ini nantinya meluas di daerah Semarang dan Surabaya melalui perhimpunan Buruh Kereta Api dan Treem pada tahun 1913. Pada mulanya pemimpin organisasi ini dipegang oleh orang-orang Belanda dan keturunannya, untuk mendapatkan pengikut dari kalangan orang Indonesia Sneevliet mencari jalan lain yaitu memengaruhi anggota-anggota Sarekat Islam cabang Semarang yang pada waktu itu sudah menjadi anggota Indische Social Democratische Vereniging (ISDV). Pada masa itu tidak ada larangan seseorang masuk menjadi anggota beberapa organisasi (Amelz, 1952:115). Dengan cara yang demikian itu kemudian Darsono dan Semaun, anggota Sarekat Islam Surabaya terpengaruh oleh organisasi tersebut. Semaun kemudian pindah ke Semarang untuk memperkuat organisasi dan menjadi pengurus ISDV. Dari sinilah kemudian menimbulkan pertentangan di dalam Sarekat Islam, yaitu pertentangan antara Sarekat Islam Semarang yang terpengaruh Marxisme dengan Central Sarekat Islam di Surabaya yang dipimpin oleh Cokroaminoto. Pertentangan ini memuncak pada tahun 1917 setelah Central Sarekat Islam memutuskan hubungan dengan ISDV.

D. Perbenturan Ideologi Perjuangan dalam Tubuh Sarekat Islam

Penjelasan sebelumnya telah menggambarkan bahwa pertumbuhan Sarekat Islam telah

didahului atau bersamaan dengan pertumbuhan organisasi lain. Organisasi-organisasi tersebut kesemuanya memiliki tujuan yang tidak berbeda dengan Sarekat Islam, yaitu ingin membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan, namun demikian dalam prosesnya akan mengalami suatu perbedaan yang prinsipil maupun perbedaan lain yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap pertumbuhan organisasi.

1. Pertentangan Ideologi Politik dalam Tubuh Sarekat Islam

Pada tahun 1913 di saat Sarekat Islam sedang melaksanakan gerak langkahnya yaitu berlangsungnya kongres Sarekat Islam pertama di Surabaya, Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet (Seorang Belanda) datang ke Jawa sebagai sekretaris dari suatu perkumpulan dagang. Ia seorang anggota Social Democratische Arbeiders Partij (SDAP) atau Partai Buruh Sosialis Demokrasi di negeri Belanda. Sneevliet bersama-sama temannya seperti Baars, Bergsma, Branstater, Dekker, C.Hartogh orang yang pertama-tama membawa ke bumi Indonesia ajaran sosialisme yang dilandasi oleh teori Marxis dan Engels (Abdulgani, 1963:24). Langkah yang pertama yang dilakukan Sneevliet di Semarang adalah menggabungkan diri dengan Sarekat Buruh Kereta Api yang tertua di Indonesia yaitu *Vereeniging van Spoor en Tremweg Personeel* (VSTP) yang organisasinya sudah tersusun secara rapi dan baik. Sebagai seorang pemimpin sosialis yang berpengalaman dalam waktu singkat telah berhasil mempropagandakan ide sosialisme dan membawa VSTP ke arah yang lebih radikal. Hampir serentak beberapa agennya juga mulai mencari jalan untuk masuk Sarekat Islam cabang Semarang. Aktivitas mereka mendapat fasilitas karena diterimanya pemikiran-pemikiran sayap kiri di Semarang. Dalam beberapa tahun (kira-kira mendekati tahun 1916) beberapa orang yang memegang posisi kunci mengawasi ketiga organisasi.

Cabang Semarang menjadi kelompok yang sukar diawasi oleh pimpinan pusat Sarekat Islam.

Walaupun menurut tujuan utama Sarekat Islam untuk meningkatkan standart rakyat Indonesia, kelompok Semarang menolak penampilan Islam dan menyerukan aksi revolusioner dan dengan provokatif menuduh anggota-anggota Sarekat Islam yang moderat sebagai borjuis. Penamaan borjuis pada umumnya dipakai oleh penulis sosialis jika membicarakan Sarekat Islam.

Sneevliet dan kelompoknya menyadari, bahwa pengawasan terhadap gerakan revolusioner mereka akhirnya harus dilahirkan oleh orang Indonesia. Mereka mulai mendidik pengikut-pengikut yang akan membawa ajaran mereka. Yang paling terkemuka diantara para pemuda Indonesia yang diindoktrinasi oleh Sneevliet ialah Semaun, orang muda dari beberapa priyayi rendahan. Semaun mempunyai pikiran yang terang dan membuktikan sebagai murid yang mempunyai kesanggupan segera saja ia menjadi salah seorang diantara pemimpin-pemimpin ISDV, sambil di tempat lain memegang jabatan penting di Buruh Kereta Api tempat dimana ia ditemukan sebelumnya. Menjelang tahun 1916 ia berusaha keras mendapat posisi yang tinggi di Sarekat Islam cabang Semarang dan menjelang tahun 1918 berhasil menjadi anggota badan sentral organisasi ini (Niel, 1958:169).

Sesudah mendapat pengesahan pada tahun 1916, kejadian-kejadian di dalam dan mengenai Sarekat Islam dapat dengan mudah dilihat melalui analisa kongres nasional tahunan yang diadakan organisasi. Kongres ini yang terdiri atas wakil-wakil dari cabang setempat, mendengarkan dan membahas berbagai masalah dan rencana tahunan yang sedang berjalan. Di dalam tubuhnya sendiri hal seperti itu menunjukkan proses demokrasi yang cukup, akan tetapi keputusan tentang hal-hal yang akan diikuti biasanya hanya dibuat oleh beberapa orang saja. Dari catatan rapat-rapat ini dapat dilihat sekarang bagaimana konflik-konflik mengenai ide dan ambisi di dalam organisasi dan dengan cara ini terlihat bagaimana pergulatan terdapat di dalam elite baru yang sedang berkembang tersebut.

Dalam kongres nasional Central Sarekat Islam pertama di Bandung tanggal 17-24 Juni 1916 yang dihadiri oleh 20 wakil-wakil Sarekat Islam daerah. Istilah nasional di sini dimaksudkan agar organisasi ini bertujuan ke arah persatuan semua golongan bangsa Indonesia dan berusaha meningkatkan derajat pribumi setaraf dengan bangsa-bangsa lain. Meskipun selalu terlempar tuduhan bahwa Sarekat Islam akan menggunakan cara kekerasan namun jelas dalam keputusan kongres ini Sarekat Islam dalam mewujudkan cita-citanya akan selalu menempuh cara-cara konstitusional dan dengan jalan evolusi berusaha agar bangsa Indonesia dapat turut serta dalam pemerintahan (Mukayat, 1981:32).

Pertumbuhan Sarekat Islam yang sangat pesat ini menimbulkan rasa tidak senang dari pemerintah kolonial, sedang di lain pihak organisasi National Indische Partij (NIP) dan ISDV berusaha untuk mendapatkan pengaruhnya dalam tubuh Sarekat Islam. Kedua organisasi ini jelas berhaluan sama, yaitu sosialisme kiri, sedang sasarannya adalah rakyat jelata, namun karena organisasi ini dipimpin oleh peranakan Indo Belanda, maka tidak mendapat tempat di hati rakyat. Inilah yang menyebabkan bahwa kedua organisasi tersebut mengarahkan tujuannya pada Sarekat Islam.

Di dalam usahanya ISDV lebih berhasil karena memiliki program yang hampir sama dengan Sarekat Islam, yaitu menentang kapitalisme, sedangkan yang utama taktiknya dapat memasukkan tenaga muda yang militan dalam tubuh Sarekat Islam. Yang menarik dari kongres pertama Central Sarekat Islam (CSI) di Bandung, bahwa Cokroamonoto dalam pidatonya dapat menempatkan posisi bangsa Indonesia terhadap Belanda terhadap bagaimana seharusnya, sedangkan semua dalam kongres ini berpendapat secara terang-terangan menentang paham yang berdasarkan agama sebagai dasar pergerakan (Amelz, 1952:117).

Kongres nasional Sarekat Islam yang kedua diadakan di Jakarta pada tanggal 20-27

Oktober 1917. Langkah-langkah yang diambil terutama ditujukan pada pemerintah jauh lebih maju dan lebih berani daripada sebelumnya, namun sifat dari pergerakan masih tetap parlemen evolusioner. Corak lain di dalam kongres diwarnai adanya perbedaan pendapat, Semaun yang pada waktu itu menjabat sebagai ketua cabang Sarekat Islam Semarang dengan pemimpin Sarekat Islam lainnya. Semaun mengusulkan agar Sarekat Islam tidak perlu ikut campur dalam gerakan Indie Weerbaar, dimana Abdul Muis duduk sebagai wakil Sarekat Islam. Selain Semaun menentang masuknya Sarekat Islam dalam Volksrand yang akan dibentuk.

Usul ini ditolak oleh kongres dan Abdul Muis tetap dikirim ke negeri Belanda. Pada waktu itu Haji Agus Salim menentang usul Semaun tentang keanggotaan Sarekat Islam dalam Volksrand, ia berpendapat bahwa Volksrand merupakan forum untuk "aksi" dan dapat bertindak sebagai penasihat bagi parlemen yang konservatif. Akhirnya Sarekat Islam dan Sentral Sarekat Islam menyetujui pengangkatan Cokroaminoto dan Abdul Muis (Mukayat, 1981:33). Dengan demikian Sarekat Islam menjalankan politik kooperasi.

Dalam kongres nasional Sarekat Islam ketiga di Surabaya pada tanggal 29 September 1918 diputuskan untuk menentang pemerintah Belanda bila dalam tindakannya masih melindungi kapitalisme. Pegawai pemerintah dianggap sebagai alat penyokong kaum kapitalisme. Selain itu menuntut supaya ditentukan upah minimum dan jam maksimum bagi kaum buruh (Noer, 1982:135). Perbedaan pendapat antara ISDV dan Sarekat Islam tak dapat dihindarkan, sedang gerakan buruh semakin besar dan menjadi perebutan dari kedua golongan tersebut, maka diputuskan untuk mengadakan pemogokan-pemogokan yang teratur untuk memperbaiki nasib, mencari keadilan dan melawan perbuatan sewenang-wenang. Pada akhirnya gerakan buruh ini mendapat dukungan dari organisasi pergerakan yang ada. Wadah dari organisasi buruh yaitu Persatuan Pergerakan Kaum

Buruh Hindia (PPKB) didirikan pada tanggal 15 Desember 1919, pemimpinnya Semaun dan wakilnya Suryopranoto, dan ia menghendaki PPKB ini berpusat di Yogyakarta. Oleh Semaun ini dianggap suatu usaha untuk mengeluarkan orang-orang komunis. Kemudian Semaun keluar dari PPKB dan didirikan Federasi baru *revolutionaire Vacentrale* (Noer, 1982:135). Sarekat kerja pegadaian yang merupakan salah satu anggota PPKB yang terpenting, yang pada waktu itu dipimpin oleh Cokroaminoto, Abdul Muis dan Agus Salim dalam kongresnya bulan Juli memutuskan untuk segala hubungannya dengan pihak komunis.

Keberhasilan revolusi Oktober di Rusia pada tahun 1917 berpengaruh dalam pergerakan nasional terutama organisasi yang berhaluan Marxis. ISDV semakin jelas berpaham kiri dan menyatakan dirinya sebagai partai komunis karena itu usahanya untuk merongrong Sarekat Islam dengan memengaruhi kebijaksanaan pimpinan serta menarik sebanyak-banyaknya anggota Sarekat Islam semakin gencar. Perpecahan dari kedua kelompok dalam tubuh Sarekat Islam tidak dapat dihindarkan. Untung sekali Sarekat Islam berhasil diselamatkan dari kemelut itu terwujudnya dwi tunggal pimpinan Sarekat Islam, yaitu HOS. Cokroaminoto dan Haji Agus Salim (Mukayat, 1981:38).

Sebenarnya dalam menghadapi propaganda kaum kiri dalam tubuh Sarekat Islam para pemimpinnya bertindak sangat toleran. Hal itu dapat dibaca dalam anggaran dasarnya bahwa Sarekat Islam pun menentang kapitalisme yang berdosa. Cokroaminoto tidak menghendaki perpecahan dan selalu bertindak bijaksana. Dalam hubungan Islam dan sosialisme ia berpendapat bahwa di dalam Islam senarnya sudah terkandung unsur-unsur sosialisme. Agama Islam menghendaki keadilan dan kemakmuran rakyat melalui cara-cara yang legal dan diridhoi oleh Tuhan (Poespoprodjo, 1984:38). Sosialisme memang mengajarkan dua jalan, yaitu dengan jalan lunak yang berarti reformis dan bersedia kompromi dengan mudah, sedangkan yang

kedua tidak kenal kompromi dan dalam memperjuangkan cita-citanya bersifat dinamis dialektis. Aliran inilah yang kemudian menjelma menjadi komunis dan memang komunisme diajarkan *Hat doel heilinght de middelen* (tujuan menghalalkan cara). Jadi jelaslah di sini sosialisme yang dikehendaki Sarekat Islam ialah sosialisme religius.

Kelompok Marxis yang semakin kuat ini terlihat pada perubahan nama yang tegas, yaitu ISDV menjadi Partai Komunis India (PKI) pada tanggal 23 Mei 1920 dengan susunan pengurus Semaun sebagai ketua dan Darsono sebagai wakil. Dalam kongres PKI istimewa tanggal 24 Desember 1920 Semaun dengan berani menyerang Sarekat Islam. Ia mengatakan bahwa Sarekat Islam sebenarnya dikendalikan oleh kaum saudagar dan kaum industri, itu justru malahan menyokong kapitalisme dan merugikan pergerakan rakyat (Mukayat, 1981:39).

Untuk menjaga kelestarian dan perkembangan Islam Agus Salim menerapkan disiplin partai. Setiap anggota Sarekat Islam harus memilih salah satu keanggotaan saja, tidak diperkenankan beranggotakan ganda. Dengan diterimanya ide disiplin partai maka Semaun Cs keluar dari Sarekat Islam. Inilah yang menjadi penyebab langsung pecahnya cabang-cabang Sarekat Islam Putih, yaitu yang masih setia pada pimpinan dwi tunggal HOS. Cokroaminoto dan Haji Agus Salim, sedangkan Sarekat Islam Merah mengikuti jejak Semaun dan Darsono yang menggantikan nama organisasinya Sarekat Rakyat sebagai *onderbouw* (susunan bawah) dari partai Komunis India.

Penyelesaian perbedaan dalam Sarekat Islam, tidak dapat terwujud, yang terjadi adalah perpecahan total antara kelompok Semarang dan Yogyakarta. Semarang dikuasai Semaun, Yogyakarta dikuasai Sarekat Islam Putih. Konflik terbuka tidak dapat dihindarkan lagi. Agus Salim dan Abdul Muis bertekad tempur membersihkan Sarekat Islam dari orang-orang komunis sampai akar-akarnya.

2. Perubahan Arah dalam Perjuangan Sarekat Islam

Setelah terjadinya peristiwa perpecahan, Sarekat Islam telah terpecah menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Fokus dari Sarekat Islam Putih adalah beralih dalam bidang pertahanan dan pembangunan Islam dan persatuan umat Islam. Haji Agus Salim melancarkan gerakan Pan Islamisme (Brakman, 1963:9). Maksudnya untuk mencari hubungan dan menghimpun segala kekuatan Islam yang ada di Indonesia. Dicari pula hubungan dengan gerakan Islam di luar negeri, sehingga dengan demikian Sarekat Islam mempunyai jiwa internasional. Massa rakyat dengan adanya peninjauan kembali kegiatan partai ini tidak merasakan perhatian lagi. Untuk mewujudkan gerakan pan islamisme ini Sarekat Islam mencari bantuan pada Muhammadiyah (Pringgodigdo, 1980:35).

Untuk mewujudkan kerjasama yang baik antara kaum muslimin, dilangsungkan kongres Al Islam pertama di Cirebon pada tanggal 31 Oktober sampai 2 Nopember 1922. Dewan Islam didirikanlah untuk mengurus soal-soal keagamaan Sarekat Islam. Tanpa diduga terjadi perpecahan di dalam kongres, yaitu antara kaum reformis diwakili Muhammadiyah serta Al Irsyad, dan golongan tradisional yang nanti tahun 1926 mendirikan Nahdatul Ulama yang mendapatkan pengikut terbesar dari muslim Jawa.

Perpecahan total terjadi pada kongres Al Islam yang kedua yang tertunda hingga bulan Mei 1924 di Garut. Hanya unsur-unsur reformis yang muncul dalam kongres yang dibicarakan persoalan kekhilafahan yang dijadikan topik pembicaraan sampai beberapa bulan. Pimpinan Sarekat Islam menjadi dekat dengan Muhammadiyah (Pringgodigdo, 1980:35). Dalam kongres luar biasa Al Islam di Surabaya pada tahun 1924, Agus Salim menguraikan kekhilafahan dalam Islam. Dia juga menguraikan nasionalisme berdasar Islam, yakni memajukan

nusa bangsa berdasarkan cita-cita Islam, kemudian di Surabaya didirikan *Central Committee Chilafat*. Tahun 1925 di Yogyakarta diadakan kongres bersama Sarekat Islam dan Al Islam, Cokroaminoto melancarkan gerakan tandzimin guna mengatur kehidupan rakyat di lapangan ekonomi, sosial, dan budaya menurut asas-asas Islam.

Segala usaha yang dilancarkan oleh Sarekat Islam setelah tahun 1921 kelihatan sekali adanya gejala-gejala mengalami kemerosotannya. Penyebab utama adalah masuknya pemikiran dan cara-cara dari golongan komunis yang diperjuangkan Semaun sehingga menjadi penyebab perpecahannya. Perpecahan ini datangnya tidak tiba-tiba, tetapi masuk secara diam-diam dalam tubuh Sarekat Islam.

Tahun 1921 merupakan tahun perubahan Sarekat Islam di dalam perkembangannya, pertama dijumpai adanya perubahan pada keterangan asas-asas partai dan kedua dicatat suatu perpecahan dengan PKI. Kedua hal ini tidak terjadi bersamaan, bukan pula keterangan asas itu disusun sebagai akibat adanya perpecahan, sebaliknya bahwa keterangan asas disusun sebelum perpecahan terjadi, tetapi kedua kejadian itu tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Karena keterangan asas itu menekankan sekali "kemerdekaan yang berasaskan keislaman...", sesungguhnya melepaskan seluruh rakyat daripada perhambaan macam apapun (Noer, 1982:144).

Dengan pandangan seperti itu, perpecahan tadi tampaknya didorong oleh penegasan Sarekat Islam bahwa kebijaksanaan dan kegiatan-kegiatannya memang berdasarkan Islam. Perumusan prinsip ini berlaku sampai tahun 1927. Faktor ketiga yang perlu diketahui adalah penahanan terhadap Cokroaminoto oleh pemerintah yang menyebabkan alasan utama untuk mengambil "politik hijrah" pada tahun berikutnya. Bagi suatu partai yang kebijaksanaan dan arahnya tergantung pada pemimpin biasanya mempunyai pengaruh besar bagi perkembangan partai. Begitu juga

halnya dengan partai komunis Indonesia, para Pemimpinnya Semaun, Darsono dibuang ke Rusia dan pada tahun 1924 Tan Malaka diusir oleh pemerintah Belanda, disebabkan karena ia melakukan aksi mogok. Hal ini mengakibatkan dilarangnya partai komunis Indonesia untuk berdiri.

3. Sarekat Islam dan Sosialisme

Politik etis sebenarnya dimaksudkan untuk mengimbangi perkembangan kapitalisme, sekaligus untuk memperkuat basis perkembangan modal dan pemerintah jajahan, dengan perbaikan administrasi. Tahun 1913-1914 tampaknya merupakan titik balik perkembangan kapitalisme. Dalam masa 1913-1914 keadaan perekonomian tidak banyak bertambah baik, mungkin bertambah buruk. Perusahaan gula mengalami krisis sejak tahun 1918 dan krisis ekonomi timbul pada tahun 1920-1921. Dalam periode 1921-1925 ekspor menurun 8,3 persen dan turun lagi 15,5 persen dan turun seterusnya hingga menjelang Perang Dunia II. Keadaan kehidupan rakyat bertambah buruk. Di bawah Gubernur Jendral Fock, pajak ekspor dicabut dan pajak industri gula dikurangi, tetapi pajak kepala rakyat di Jawa dan Madura, ditambah atau naik sebesar 40%. Kegelisahan rakyat itu dimanifestasikan oleh pemberontakan-pemberontakan petani di Jambi (1916), Pasar Rebo (1916), Tjimareme (1918), Toli-Toli (1920), kemudian pemberontakan di Banten, Sumatera Barat dan Prambanan sekitar tahun 1926 dan 1927. Pada tingkat dunia, kapitalisme imperial internasional mulai mengalami masa krisis sejak tahun 1914 dan masa itu ditandai oleh usaha pengorganisasian kembali kapitalisme industrial yang mulai tumbuh sejak bagian pertiga terakhir abad XVIII dan bagian pertiga dari abad XIX serta mengalami konsolidasi ke dalam dan ekspansi imperial keluar dalam periode 1825-1870 (Kartodirdjo, 1976:81-84).

Sarekat Islam dan organisasi pergerakan nasional lainnya di Indonesia, menyatakan perang terhadap kapitalisme dan melihat

sosialisme sebagai alternatif. Sarekat Islam juga menengok ke sosialisme dalam konteks yang mudah dipahami, tetapi Sarekat Islam menolak marxisme, seperti yang dibawa oleh Semaun, yang pada tahun 1932 diasingkan pemerintah Hindia Belanda, atau Tan Malaka yang juga lari keluar negeri setelah pemberontakan PKI 1926. Tetapi rupanya bagi Sarekat Islam dan persepsi Cokroaminoto, Sarekat Islam pada awal dasawarsa 1920-an menghadapi tugas dan tuntutan untuk bisa mengembangkan dirinya yaitu pertama, mempelajari masyarakat Indonesia sendiri secara lebih baik, kedua memperdalam pengetahuan mengenai ajaran-ajaran Islam dan mengalami proses Islamisasi lebih lanjut dan mengetahui lebih baik apa sebenarnya sosialisme itu, karena itu maka Soerjopranoto dalam kursus-kursus Sarekat Islam di Yogyakarta diminta untuk mengajarkan sosiologi sebagai alat analisa untuk memahami masyarakat Indonesia dan KH. Fachrudin diminta untuk mengajarkan agama Islam. Cokroaminoto sendiri yang merasakan kekurangannya dalam hal keislaman berusaha memperdalam pengetahuannya dan membaca antara lain buku *The Spirit of Islam* karya Sayed Ameer Ali, *The Ideal Propet* dan juga Tafsir Al Quran karya Maulana Muhammad Ali sehingga ia mampu menulis buku *Tarekh Islam* (Amelz, 1952:137-138). Menjelang kongres Al Islam di Garut tahun 1922, Cokroaminoto merasa perlu untuk menulis artikel berjudul "Apakah Sosialisme itu" dan Sosialisme berdasar Islam, dalam Koran Sarekat Islam. Usaha untuk mengetahui lebih jauh apa sosialisme itu dilanjutkan dengan hasil sebuah buku *Islam dan Sosialisme*, terbit tahun 1924, (Amin, 1980:35). Dalam kursus-kursus Sarekat Islam, Cokroaminoto mendapat tugas mengajar tentang sosialisme.

Cokroaminoto dalam buku *Islam dan Sosialisme* ternyata menolak filsafat Historis Materialisme Karl Marx walaupun sebenarnya Cokroaminoto keliru dalam memahami metode ilmiah Marx itu, mungkin karena tak sempat membaca langsung karya Marx yang

tidak mudah dipahami dengan alasan historis-materialisme itu, mungkir kepada Allah dan juga bertuhankan benda, tetapi menganggap segala sesuatu itu pada hakikatnya benda atau berasal dari benda, termasuk akal dan perasaan (Tjokroaminoto, 1963:22). Cokroaminoto sebenarnya cukup paham untuk tidak mencampuradukkan pengertian materialisme dalam bahasa pergaulan yang diartikan sebagai sikap hidup yang dikuasai oleh keserakahan yang justru ditentang oleh Marx dengan Materialisme sebagai paham filsafat yang serba benda, tetapi Cokroaminoto tak berhasil memahami arti metode materialisme historis sebagai alat analisa untuk memahami hukum-hukum dan realitas perkembangan masyarakat dari tahap komunal primitif hingga ke tahap sosialis berdasarkan postulat bahwa bukanlah kesadaran masyarakat yang berwujud paham metafisik, hukum, negara dan berbagai kelembagaan masyarakat, yang menentukan kondisi hidup, sebaliknya kondisi masyarakatlah yang coraknya berintikan modal produksi atau cara berproduksi yang ditandai oleh hubungan sosial dari produksi dan tahap perkembangan organisasi ekonomilah yang pada dasarnya menentukan struktur kesadaran masyarakat yang tercermin pada ideologi mereka. Tujuan filsafat materialisme Marx adalah menunjukkan bahwa kenyataan itu ada secara objektif dan bukan hanya ada karena ide-ide dan kesadaran manusia. Materialisme Marx akan lebih mudah dipahami jika diletakkan dalam posisi dengan paham idealisme yang mengingkari kemungkinan adanya realitas di luar ide-ide dan kesadaran, tetapi yang terlebih penting untuk diketahui tentang buku *Islam dan Sosialisme* adalah, apa yang menjadi tujuan utama Cokroaminoto. Tujuan Cokroaminoto tampaknya adalah untuk membuat perhitungan terhadap ideologi sosialisme. Cokroaminoto pertama-tama mengambil sikap terbuka. Ia selalu berkata, "Seorang Islam sejati dengan sendirinya menjadi sosialis dan kita kaum muslimin, jadi kita kaum sosialis" (Amelz, 1952:115). Sosialisme sebagai cita-cita kemasyarakatan

bagi dia sejalan dengan Islam, sepanjang ia bertujuan memperbaiki nasib kelompok manusia termiskin dan terbanyak bilangannya, agar supaya mereka bisa mendapatkan nasib yang sesuai dengan derajat manusia, tetapi dia menyadari juga bahwa sosialisme bukan semata-mata stelsel ekonomi, melainkan mengandung ajaran filsafat tertentu. Selain itu dia melihat bermacam-macam wujud stelsel yang diberi nama sosialisme. Oleh karena itu, dia ingin menjernihkan pengertian tentang apa sebenarnya sosialisme itu, sementara itu dia tahu bahwa pada umumnya masyarakat Indonesia, khususnya golongan terbawah tidak tahu apa itu sosialisme, karena tidak adanya kepustakaan yang cukup dalam bahasa Indonesia. Atas dasar itulah dia ingin menyiarkan pengetahuan seluk-beluk sosialisme kepada masyarakat.

Soal penting lain lagi bagi Cokroaminoto adalah bahwa umat Islam dan bangsa Indonesia, termasuk golongan dan pimpinan Sarekat Islam sendiri, ternyata kurang pengetahuannya tentang Islam itu sendiri. Itupun dia rasakan pada dirinya sendiri. Karena itu, orang harus susah payah memusatkan perhatiannya pada suatu ideologi dari Eropa. Sementara, tentang agama yang sudah dipeluknya sendiri pengetahuannya kurang luas atau mendalam. Dia juga khawatir bahwa unsur-unsur kebajikan agama pada lapisan-lapisan masyarakat terbawah tampak makin lemah dan secara perlahan-lahan pergerakan rakyat yang bersifat sosialis itu semakin bertambah teguh bersandar kepada kebendaan belaka. Atas dasar inilah dia memutuskan untuk sekaligus membicarakan sosialisme dalam kerangka yang lebih luas dari ajaran-ajaran sosial Islam itu sendiri, sambil membantah perkataan orang yang menyatakan agama Islam tidak cakap memajukan hal-hal yang bertalian dengan politik, sosial dan ekonomi.

Buku *Islam dan Sosialisme*, ternyata hanya merupakan kajian awal. Dalam kongres PSSI, yaitu Sarekat Islam yang sudah lebih tegas

bersifat keindonesiaan di Surabaya tahun 1931, Cokroaminoto disertai menyusun program asas dan program tandhim. Di situlah ia memperoleh kesempatan untuk mengkonkritkan gagasannya. Ia menggali ajaran-ajaran Islam tentang persatuan umat, konsep tentang negara dan pemerintah, serta pembahasan tentang nilai-nilai kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan menurut Islam. Di samping itu, dia mengupas pula masalah penghidupan ekonomi, termasuk mengupas realitas kapitalisme dengan mengutip analisa dari partai sosialis Jerman dalam kongresnya di kota Erfurt tahun 1891. Pada tahun 1932 ia juga ditugaskan untuk menyusun "Reglement Umum Bagi Islam" yang memberi pedoman umum bagi kehidupan sosial Islam, guna menciptakan apa yang disebutnya Islam *gemeente* atau Islam *gemeenschap* atau "perikatan hidup Islam", sebab dengan rasa prihatin yang mendalam ia melihat umat Islam belum sekali-kali menjadi suatu umat: tidak ada maksud dan tujuan bersama, tidak ada keperluan bersama, tidak merasa hidup bersama di dalam satu roh.

Keprihatinan itu dirasakan juga oleh Haji Agus Salim, pengikut Cokro yang kesetiiaannya tidak tertara, yang melihat golongan pemuda terpelajar sangat kurang dan bahkan picik pengetahuannya tentang Islam, sekalipun mereka mengaku beragama Islam. Usulnya untuk mengadakan kursus guna memajukan pengetahuan tentang Islam pada Jong Java ternyata di tolak, karena itu ia menggerakkan pemuda Jong Java dan Raden Syamsurijal, bekas ketua Jong Java untuk membentuk Jong Islamieten Bond. Dalam kongres II di Solo tahun 1926 diadakan seminar yang membicarakan Islam dalam hubungannya dengan oandangan dunia, pikiran merdeka serta perkembangan Islam di luar negeri. Dalam kongres III tahun 1927 di Yogyakarta dibicarakan konsep-konsep Islam secara khusus, yaitu tentang cita-cita persatuan, kebangsaan dan tak lupa juga dibicarakan tentang Islam dan sosialisme.

E. Simpulan

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi dalam tubuh Sarekat Islam disebabkan oleh perbedaan ideologi perjuangan antara SI Putih dan SI Merah. Sarekat Islam Putih, yaitu yang masih setia pada pimpinan dwitunggal HOS. Cokroaminoto dan Haji Agus Salim, sedangkan Sarekat Islam Merah mengikuti jejak Semaun dan Darsono yang menggantikan nama organisasinya Sarekat Rakyat sebagai *onderbouw* (susunan bawah) dari partai Komunis India. Cabang-cabang Sarekat Islam Merah memisahkan diri sebagai akibat penerapan disiplin partai yang melarang seseorang menjadi anggota lebih dari satu partai.

Konflik dalam pergerakan Sarekat Islam berdampak pada terpecahnya Sarekat Islam menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Fokus dari Sarekat Islam Putih adalah beralih dalam bidang pertahanan dan pembangunan Islam dan persatuan Umat Islam. Dampak selanjutnya Haji Agus Salim kemudian melancarkan gerakan Pan Islamisme. Maksudnya untuk mencari hubungan dan menghimpun segala kekuatan Islam yang ada di Indonesia dan mencari juga hubungan dengan gerakan Islam di luar negeri, sehingga dengan demikian Sarekat Islam mempunyai jiwa internasional. Untuk mewujudkan gerakan Pan Islamisme ini Sarekat Islam mencari bantuan kepada Muhammadiyah.

Selain itu perpecahan juga didorong oleh penegasan Sarekat Islam bahwa kebijaksanaan dan kegiatan-kegiatannya memang berdasarkan Islam. Perumusan prinsip ini berlaku sampai tahun 1927. Faktor ketiga yang perlu diketahui adalah penahanan terhadap Cokroaminoto oleh pemerintah yang menyebabkan alasan utama untuk mengambil "politik hijrah" pada tahun berikutnya. Bagi suatu partai yang kebijaksanaan dan arahnya tergantung pada pemimpin biasanya mempunyai pengaruh besar bagi perkembangan partai. Begitu juga halnya dengan partai komunis Indonesia, para

Pemimpinnya Semaun, Darsono dibuang ke Rusia dan pada tahun 1924 Tan Malaka diusir oleh pemerintah Belanda, disebabkan karena ia melakukan aksi mogok. Hal ini mengakibatkan dilarangnya partai komunis Indonesia untuk berdiri.

Daftar Pustaka

- Alfian. 1981. *Politik Kebudayaan dan Manusia Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Amelz. 1952. *HOS. Tjokroaminoto Hidup dan Perjuangannya*. Djakarta: Bulan Bintang.
- Amin, M. Mansyur. 1980. *Salam HOS. Cokroaminoto dalam Kebangunan Islam dan Nasionalisme di Indonesia*. Yogyakarta: Nur Cahaya.
- Brackman, Arnold C. 1963. *Indonesia Communism A History*. New York: Basic Books.
- Burger, DH. 1962. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*. Djakarta: PN. Pradnjaparamita.
- Carey, Peter. 1986. *Orang Jawa & Masyarakat Cina (1755-1825)*. Jakarta: Pustaka Azet.
- Coppel, Charles A. 1983. *Indonesia Chinese in Crisis*. Kuala Lumpur: Oxford University.
- Haq, Abdul. 1985. *Gerakan Islam di Korea dan Indonesia*. Yogyakarta: Dua Dimensi.
- Kahin, George Mc. Turnan. 1952. *Nasionalism and revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Kansil, CST. 1983. *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Kartodirdjo, Sartono. 1976. *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid V*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Koch, DMG. 1951. *Menudju Kemerdekaan, Sedjarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia Sampai 1942*. (Terjemahan Abdul Muis), Djakarta: Jajasan Pembangunan.
- McVey, Ruth T. 1965. *The Rise of Indonesian Communism*. Ithaca: Cornell University Press.

- Mukayat. 1981. *Haji Agus Salim The Grand Old Man of Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Niel, Robert van. 1970. *The Emergence of The Modern Indonesia Elite*. Chicago: The Hague W. Van Hoeve Publisher.
- Noer, Deliar. 1982. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900, 1942*. Jakarta: LP3ES.
- Poespoprodjo, W. 1984. *Jejak-jejak Sejarah 1908-1926, Terbentuknya Suatu Pola*. Bandung: Remaja Karya.
- Pringgodigdo, AK. P. 1980. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Ricklefs, M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Scherer, Savitri. 1985. *Keselarasn dan Kejanggalan: Pemikiran-Pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Schrieke, B. 1955. *Indonesian Sociological Studies*. Bandung: Sumur Bandung.
- Sosrodiharjo, Soedjito. 1972. *Perubahan Struktur Masyarakat di Jawa*. Yogyakarta: Karya.
- Soyomukti, Nurani. 2012. *Soekarno & Cina: Nasionalisme Tionghoa dalam Revolusi Indonesia, Soekarno dan Jakarta-Peking, Sikap Bung Karno terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia*. Yogyakarta: Garasi.
- Susanto, Budi SJ. "Rekayasa Kekuasaan Ekonomi (Indonesia 1800-1950): Siasat Pengusaha Tionghoa." Dalam Lembaga Studi Realino. *Penguasa Ekonomi Dan Siasat Pengusaha Tionghoa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tirtoprodjo, Susanto. 1977. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Jakarta: PT. Pembangunan.
- Tjokroaminoto, HOS. 1963. *Islam dan Sosialisme*. Jakarta: Lembaga Penggali dan Penghimpun Sejarah Revolusi Bersama.
- Wasino. 2006. *Wong Jawa Dan Wong Cina*. Semarang: Unnes Press.
- Wertheim. 1959. *Indonesian society in Trantition; Study of Social Change*. Bandung: The Hague.
- Winarni, Retno, dkk. 2011. "Cina di Ujung Timur Jawa: Dari Pemegang Kontrak Sampai Bupati pada Akhir Abad XVIII hingga Awal Abad XIX." Dalam *Literasi*. Volume 1 Nomor 2 Desember 2011.